

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PERIODE 2010 - 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA**

***THE INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT  
(GRDP) AND REGIONAL SPENDING ON REGIONAL ORIGINAL  
INCOME PERIOD 2010 - 2019 IN DKI JAKARTA PROVINCE***

**Zaenal Arifin**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,  
Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

\* zaenalarifin1974@gmail.com

**ABSTRAK**

*Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Penelitian ini mengungkapkan seberapa besar pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan BPS Provinsi DKI Jakarta dengan 9 periode yakni dari tahun 2010-2019, survei dilakukan pada bulan September-November 2021. Data di analisis dengan menggunakan metode OLS (Eviews-10) dengan metode pengolahan data yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019. (2) Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019 (3) Secara simultan PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019.*

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, pdrb, belanja daerah, Jakarta

**ABSTRACT**

*Increasing Regional Original Income (PAD) is one of the success factors in achieving regional development goals. This is because PAD determines the capacity of local governments to carry out government functions, namely public services (public service functions) and development (development functions). This study reveals how much influence GRDP and Regional Expenditures have on Regional Original Income in DKI Jakarta Province for the 2010-2019 period. This study uses secondary data from the Regional Financial Management Agency (BPKD) and BPS with nine periods, namely from 2010-to 2019; the survey was conducted from September-November 2021. The data was analyzed using the OLS method (Eviews-10) with the data processing method, namely Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that: (1) GRDP has a positive and significant effect on local revenue in DKI Jakarta Province for the 2010-2019 period. (2) Regional Expenditures have a positive and insignificant effect on Regional Original Income of DKI Jakarta Province for the 2010-2019 Period (3) Simultaneously, GRDP and Regional Expenditures have a significant and influential effect on Regional Original Income of DKI Jakarta Province for the 2010-2019 period.*

**Keywords:** regional original income, GRDP, regional spending, Jakarta

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function).

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, dimana salah

satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 26,49%.. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi

fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan.

Variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD, pengadaan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan, dan penyesuaian tarif. Sedangkan variabel yang tidak dapat dikendalikan antara lain yaitu perkembangan PDRB. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Alasan penulis meneliti Provinsi DKI Jakarta karena merupakan Ibukota Negara dan juga merupakan kota jasa, industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui sektor jasa, industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar, maka akan berdampak pada sektor-sektor yang lain yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah di Provinsi DKI Jakarta akan lebih jelas jika melihat variabel makro seperti Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan apakah perkembangan variabel makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel makro terhadap penerimaan PAD di Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun

pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key dalam Yovita 2011:02). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik, dan dapat diatasi dengan pendekatan ilmu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Akan tetapi pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Belanja Daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sehingga penelitian ini diberi judul, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2010- 2019”.

Potensi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain adalah PDRB, dan Belanja Daerah, sedangkan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam

menggali sumber-sumber penerimaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dirinci sebagai berikut:

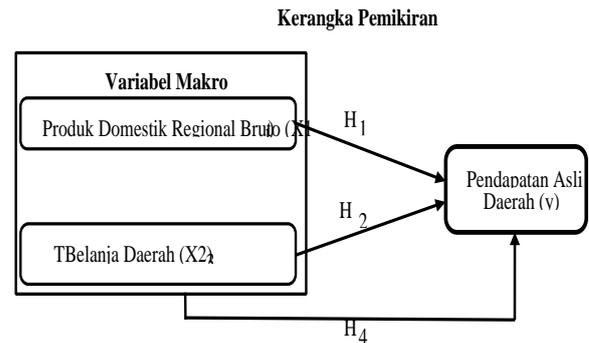
- 1 Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 - 2019?
- 2 Apakah Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 - 2019?
- 3 Apakah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2019?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2010-2019.

Dari penelitian diatas muncul suatu kerangka teoretis dalam penelitian ini yang harus dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan PDRB dan Belanja Daerah terhadap penerimaan PAD khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian ini, maka disusunlah kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1.

Hipotesis

- H<sub>1</sub> Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2019.
- H<sub>2</sub>: Variabel Belanja Daerahi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2019.
- H<sub>3</sub>: Variabel makro (Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2019.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017: 23) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

Produk Domestik merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-

kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Pengalihan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.,

PDRB merupakan indikator yang memberikan gambaran tentang keadaan

ekonomi suatu wilayah, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

- a. PDRB menurut pendekatan produksi Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- b. PDRB menurut pendekatan pendapatan Merupakan balas jasa yang digunakan oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.
- c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran Merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah bisa berbeda untuk setiap negara, sejumlah indikator yang digunakan oleh Lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP dan PDRB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga yang berlaku dan harga konstan, PDRB atas harga yang berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sementara PDRB atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana sejak tahun 2005 BPS telah melakukan perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB dari tahun 1993 menjadi tahun 2000 sebagai tahun dasar perhitungan PDRB atas dasar harga konstan

Pembangunan daerah yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan indikator produk domestik regional bruto diartikan pula sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. (Taufik, 2009)

**Belanja Daerah** Menurut Halim (2007:100) belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang

berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2010-2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2010-2019 dijabarkan di bawah ini:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- b. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- c. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- d. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
- e. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
- f. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
  - 1) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - 2) Hibah, untuk menyentuh kegiatan / usaha penduduk / komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum; Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited hal 47
- 3) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
- 4) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
- g. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta pada bulan November 2021. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data Time Series (urutan waktu) yaitu data yang dikumpulkan dari tahun ke tahun 2010 - 2019, dimana data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau Instansi Pemerintah yaitu BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan BPS di Provinsi DKI Jakarta dengan variabel independent Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X1), Belanja Daerah (X2) dan variabel dependent Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dengan hubungannya (corelation) pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.

Teknik Analisa Data yang digunakan yaitu:

1. Analisa Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Model Regresi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi, yaitu:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ , Dimana: Y = PAD a = Konstanta X1 = PDRB X2 = Belanja Daerah b1 dan b2 = Koefisien regresi X1 dan X2 e = Kesalahan Pengganda (error)

Teknik pengambilan sampel yaitu non probabilitas purposive sampling berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). Judgment sampling merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010-2019 karena memiliki sektor jasa, industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, yang potensial untuk dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan karena dipengaruhi kondisi Pandemi Covid 19 dan perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas

Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif yang dilakukan terbagi menjadi dua langkah yaitu: uji asumsi klasik yang menggunakan OLS (Eviews-10). OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Model Regresi linear yang dipakai dengan menggunakan OLS tersebut, harus memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yaitu Normalitas, Linearitas, Non Multikolinearitas, Homoskedastitas, Non Aotukorelasi dan uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji hepotesis serta koefisien determinasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dependent Variable: PAD  
 Method: Least Squares  
 Date: 12/24/21 Time: 10:38  
 Sample: 2010 2019  
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.010375	0.004286	2.420629	0.0460
BD	0.347721	0.188370	1.845947	0.1074
C	4.95E+12	4.46E+12	1.108381	0.3043
R-squared	0.916966	Mean dependent var		3.13E+13
Adjusted R-squared	0.893242	S.D. dependent var		1.14E+13
S.E. of regression	3.72E+12	Akaike info criterion		60.96817
Sum squared resid	9.66E+25	Schwarz criterion		61.05894
Log likelihood	-301.8408	Hannan-Quinn criter.		60.86858
F-statistic	38.65135	Durbin-Watson stat		1.517739
Prob(F-statistic)	0.000165			

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil analisis regresi linier berganda dapat digambarkan dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\hat{Y} = PAD = 4.9500 + 0.010375PDRB + 0,347721BD$$

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa

**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Histogram – Normality test. Hasil pengujian ini untuk nilai Probabilitynya sebesar 0,809 dan nilai Jargue Bera. sebesar 0,423 maka dengan demikian hasil tersebut dinyatakan berdistribusi normal hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar 0,05

**Uji Linearitas**

Pengujian linearitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Ramsey RESET Test. Hasil pengujian nilai ini probability t-statistiknya sebesar 0,973 dan F statistiknya. sebesar 0,973 maka dengan demikian hasil tersebut dinyatakan berdistribusi linearitas hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar 0,05

**Uji multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan pada model regresi dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen, masing-masing memiliki nilai VIF berada < 10, demikian juga hasil nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji Heterokedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glajser menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas

**Pengaruh PDRB dan Belanja Daerah secara simultan terhadap Realisasi PAD**

Berdasarkan hasil regresi model fixed effect diperoleh nilai koefisien sebesar 0.893242 dimana dikatakan layak atau kuat suatu model jika nilai Adjusted R-squared lebih besar dari pada 0,50 dan besaran sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel

Pendapatan Asli Daerah sebesar 89,32 % Sedangkan sisanya 10.68% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau tidak. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai statistik sebesar 38.65135 dengan probabilitas statistik F sebesar  $0.0000165 < \alpha$  5% yang berarti  $H_0$  ditolak. Variabel bebas yaitu PDRB, dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Wipayani Pawelloi (2020) yang berjudul "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Periode 2008-2018.

### **Pengaruh PDRB terhadap Realisasi PAD**

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa Pada uji t, dapat diketahui variabel PDRB secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD, dengan hasil t hitung 0.010375 dengan tingkat signifikan 0.0460 pada alfa 5%. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD dengan demikian maka hipotesis  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh positif antara variabel PDRB dengan PAD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2019. Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa PDRB dengan nilai positif mengasumsikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dengan meningkatkan distribusi Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) , Ekspor, Impor, Pedagangan, Industri, Jasa Keuangan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan yang merupakan penggunaan dan jenis lapangan usaha/sektoral yang memberikan sumbangan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan perekonomiannya yang menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), peningkatan tersebut akan meningkatkan pajak daerah yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta..Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Ani Aryanti (2010) yang berjudul "Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Periode 2000-2009.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Realisasi PAD**

Pada uji t, dapat diketahui variabel Belanja Daerah secara statistik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil t-hitung 0.347721 dengan tingkat signifikan 0.1074 pada alfa 5%, Variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2019, dengan demikian maka hipotesis  $H_0$  diterima berarti ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel Belanja Daerah dengan PAD di Provinsi DKI Jakarta, hal ini mengasumsikan bahwa Pemda Provinsi DKI Jakarta perlunya melakukan peningkatan Belanja Daerah yang tepat sasaran dan wajar dengan tetap melakukan efisiensi belanja dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Wipayani Pawelloi (2020) yang berjudul "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Periode 2008-2018

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2010-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2010-2019..
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
  - a. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019.
  - b. Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2019.
3. Peningkatan PDRB Provinsi DKI Jakarta sangat perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta perlu juga melakukan peningkatan Belanja Daerah secara wajar dengan tetap

melakukan efisiensi belanja dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2006). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Simposium Nasional*. Padang.
- Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. (diunduh dari [www.http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admi/urnal](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admi/urnal)).
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017, Agustus). Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 (8), 1-18.
- Aldeefar & Rajawali Azis. (2012). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2004). *UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Semarang: CV Duta Nusindo.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atep Adya Barata. (2010). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Terjemahkan Barata.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 – 2019*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019.....Indikator Ekonomi Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta.
- Barata, A. A. (2010). *'Pendapatan asli daerah*. Jakarta: Terjemahan Barata.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erlangga Ashoer, M., and S. Said. (2016). The Impact of Perceived Risk on Consumer Purchase Intention in Indonesia; A Social Commerce Study." *International Journal of International Conference on Accountin*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariance dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekom*, 4(2), 4543-4557.
- Haris, Syamsuddin. 2. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Jogjakarta: BPFE.
- Kuntari, T. d. (2010, Maret). Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *ASET Jurnal Ilmu*, 12, 87-94.
- Pawenang, Supawi. (2011). *Ekonometrika Terapan*. Jogjakarta: IDEA Press.
- Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus. (1995). *Makro Ekonomi. Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Kediri". *Dinamik Pembangunan*, 2, 9-18.
- Sekaran, Uma. . (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.